BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik menjadi hal yang sangat sentral dalam suatu partai politik. Hal ini menjadi patokan dasar dalam setiap peristiwa dan kegiatan politik yang di lakukan pada aktifitas politik, sebagaimana yang terjadi di dalam internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang selalu menarik untuk diperbincangkan dengan banyaknya dinamika-dinamika yang di timbulkan akibat mandetnya komunikasi politik dan tidak kokohnya bangunan komunikasi politik yang dibangun.

Dinamika komunikasi politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar selalu menimbulkan turbelensi yang besar, karena lebih jauhnya dinamika komunikasi politik yang terjadi di dalam internal partai selalu membawa kegaduhan politik yang berujung pada perpecahan partai, seperti beberapa tahun belakangan menimbulkan perpecahan yang menelurkan partai-partai baru yang diinisiasikan oleh kelompok-kelompok yang kecewa dengan kebijakan partai. Tidak terluput dari ingatan kita peristiwa 1999, 2004 dan 2010. Pada tahun 1999, dua partai politik baru terbentuk pada dinamika yang terjadi dalam musyawarah nasional Partai Golkar, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan, yang kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara pada tahun 2004, dualisme dalam tubuh Golkar menciptakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura).Sementara itu, pada tahun 2010 perpecahan di tubuh golkar memunculkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dalam konstelasi politik di internal Dewan Pimpinan Pusat Partai, Partai Golkar selalu terjebak dalam fragmentasi yang akut dalam tataran elitnya, tak bisa dipungkiri bahwasannya dinamika komunikasi politik di dalam internal partai golkar selalu mengalami tubelensi hingga terdisorientasi arah politiknya.

Dinamika-dinamika tersebut kembali terulang dalam rentan periode berikut dari periode terdahulu dimana di penghujung tahun 2014 lalu konflik yang berujung pada perpecahan yang menghasilkan dua kubu dan melegitimasi dirinya bahwa kubu mereka masing-masing mempunyai legalitas atas kepemimpiman Partai Golkar. Dari kejadian tersebut, tergambar jelas bagaimana buruknya komunikasi politik yang dimainkan oleh para elit partai sehingga membawa kader-kader lainnya untuk melakukan hal yang sama. Adanya ketidakharmonisan antara elemen-elemen yang ada di internal Partai Golkar.

Konflik selazimnnya akan terjadi karena ada beberapa pihak yang biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh. Akibatnya, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas. Bahkan, peristiwa pertentangan itu dapat dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan tersebut. Para elit partai cendrung bersifat koersif dan tidak mengindahkan kepentingan banyak pihak dan tidak memainkan peran komunikator politiknya dengan baik. Aburizal Bakrie yang masih ingin menduduki kursi ketua umum partai memaksakan diri melaksanakan musyawarah

nasional di Bali dan Agung Laksono cs yang menginginkan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan Partai Golkar kembali pada puncak kejayaannya lagi juga melakukan muasyawarah nasional yang di adakan di Ancol, Jakarta. Masing-masing pihak yang melaksanakan musyawarah nasional merasa sudah melaksanakan yang di amanatkan oleh AD/ART dan sudah mempunyai legitimasi.

Dinamika komunikasi politik yang berujung pada konflik yang membawa perpecahan ini di akibatkan buntunya komunikasi politik antar para elit dan para kader di internal Partai Golkar. Sebagaimana formulasi Dan Nimmo yang menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses interkasi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial, sehingga rumusan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar kosekwensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik (Arifin, 2003 : 9). Namun, pemikiran tersebut bersifat situasional, karena konflik terjadi sebagai akibat tidak tercapainya komunikasi yang ideal, yaitu mampu menginterpretasikan simbol-simbol yang diakui dan disetujui bersama, atau adanya kesamaan makna yang ditangkap. Sehingga posisi komunikasi politik sejatinya sebagai "*das sollen"* yang berarti kegiatan yang bermaksud untuk meminimalkan konflik, mewujudkan harmonisasi. Sedangkan kegiatan politik yang bersifat empiris termasuk konflik sebagai suatu wilayah "*das sein".* Maka bisa dirumuskan komunikasi politik sebagai suatu proses kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.

Dikeluarkannya Surat Keputusan atau SK Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016, Partai Golkar kembali kepada hasil Musyawarah Nasional Riau 2009, dimana sebelumnnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Agung Laksono dengan hasil Musyawarah Nasional Ancol, namun atas dasar pertimbangan diadakannya islah guna menambal retakan-retakan yang terjadi dalam perpecahan ini maka di keluarkan lah Surat Keputusan tersebut.

Dengan keluarnya Surat Keputusan atau SK ini lah merupakan titik terang bagi Partai Golkar untuk islah, dan juga dengan adanya dorongan yang kuat serta pengaruh yang besar dari sosok senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan juga Akbar Tandjung serta beberapa tokoh senior Partai Golkar lainnya, mampu membentuk bangunan komunikasi politik yang solid sehingga menekan kedua belah pihak yang berkonflik untuk segera berkonsolidasi, dan pada akhirnya ditetapkannya musayawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016, dan juga menjadi hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang dihadiriolehAburizal Bakrie yang juga disetujui oleh Agung Laksono yang mana mereka tergabung dalam kepengurusan hasil musyawarah nasional riau 2009 sebagaimana Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Ham. Sentuhan-sentuhan komunikasi politik yang seperti ini lah yang seharusnya dimainkan oleh para elit partai dan kader yang terlibat dalam konfilk, sentuhan yang mana mampu meredam sikap koersif dari suatu belah pihak guna kepentingan bersama Partai Golkar. Hal ini juga atas dasar kesepakatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I maupun tingkat II yang juga sudah mengidentifikasi bahwa konflik berkepanjangan hanya

merugikan partai mereka saja.Peran sentral para tokoh senior partai sangat terasa kental untuk meredam konflik berkepanjangan ini. Forum musyawarah nasional luar biasa ininantinya menjadi ajang konsolidasi bagi partai berlambang beringin ini yang telah mengalami konflik selama enam belas bulan belakangan.Yang menarik dalam pelaksanaan munas luar biasa kali ini adalah akan menghasilkan ketua umum baru dengan tidak majunya Aburizal Bakrie yang sebelumnya mempunyai legitimasi sebagai ketua umum pada musyawarah nasional Bali dan juga tidak majunya Agung Laksono ketua umum pada munas Ancolyang sudah menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam kontestasi tersebut.

Selazimnya suatu kontestasi politik, ada jalinan komunikasi politik yang dilakukan guna membangun kesepahaman politik, karena pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik seperti pernyataan Greber (1981:23) bahwa "sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik". Bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun non verbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosa kata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, *setting* di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan" (Arrieanie dalam Mulyana dan Solatun, 2007:30). Oleh karenanya, munasluar biasa kali ini akan mengalami turbelensi komunikasi politik di internal partai tersebut.Dalam artian peranan besar komunikasi politik yang dijalankan oleh suatu partai politik sangat berpengaruh bagi masyarakat politik dalam konteks penelitian kepada anggota partai politik

terutama yang memiliki hak suara dan elit politik dalam kontestasi pemilihan ketua umum partai tersebut.

Proses politik bisa dipahami dan dipelajari sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama dan bersaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Beberapa hubungan itu tak lansung, tetapi merupakan reaksi berantai yang bersinambung secara layak, membentengi seluruh jarak politik.Namun banyak pola yang bermakna hanya membentang separuh jalan, baik dari kutub atau segmen tanpa dampak yang mudah tampak pada setiap kutub itu. Bahkan pola-pola segmental ini saling lingkup dan perilaku kondisi serta hubungan pada segmen-segmen yang lain (Oliver Garceau, Dan Nimmo:2005).

Komunikasi politik mempunyai arti yang sangat penting, terutama di era reformasi dewasa ini. Iklim keterbukaan dan demokratisasi yang dibangun, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara lansung maupun pemilihan kepala daerah yang juga dilakukan secara langsung akan semakin menambah pentingnya arti komunikasi politik di Indonesia.Komunikasi politik merupakan suatu aktivitas pesan orang-orang yang melakukan kegiatan politik, dalam bentuk mempengaruhi, menstimulus dan menggalang dukungan oranglain untuk melakukan kegiatan politik, baik pada tingkatan internal partai dan hubungan antar partai politik.

Komunikasi politik sebagai kajian memang memiliki universalitas atau keberlakuan secara umum.Akan tetapi sebagai suatu praktik, komunikasi politik tentu memiliki perbedaan-perbedaan sebagai akibat adanya perbedaan adat

istiadat dan budaya setempat.Komunikasi politik itu sendiri di pengaruhi oleh sistem budaya dan sistem politik itu sendiri. Apabila di masa sebelum reformasi atau pada masa orde baru, komunikasi politik berkembang di Indonesia lebih bersifat satu arah, yakni dari atas kebawah *(up-down)*, maka pada era reformasi ini komunikasi yang berkembang menjadi dua arah, yakni tidak hanya dari atas kebawah, tapi juga dari bawah ke atas *(bottom-up).*Perubahan ini sejalan dengan perubahan sistem politik dan sistem sosial yang diterapkan di Indonesia, dari sistem politik yang otoriter dan tersentralisasi menjadi sistem politik dan sistem sosial yang demokratis dan terdesentralisasi.

Penetapan diadakannya musyawarah nasional luar biasa pada partai golkar melahirkan berbagai macam opini dari para kader. Setelah penetepan munas luar biasa dan di rumuskannya susunan kepanitian pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa justru menimbulkan berbagai macam opini dari beberapa kader partai, dikarenakan adanya kefaksian dalam susunan kepanitian tersebut menjadi yang menjadi pertanyaan besar bagi beberapa kader yang aktif di dewan pimpinan pusat partai. Beberapa kader melihat bahwasannya ada keberpihakan pada kepanitiaan musyawarah nasionalluar biasa tersebut, seharusnya kepanitian itu melibatkan pihak yang netral yang tidak tendensius terhadap suatu kubu sehingga terciptanya musyawarah nasional luar biasa yang *fair*yang nantinya tidak ada lagi perpecahan yang lebih jauh dan lebih lanjut. Namun dalam konteks tersebut, politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau

melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi (Nimmo dalam Mulyana dan Solatun, 2007:30), jadi dapat di asusmsikan bahwa masing-masing kelompok atau kubu yang sebelumnya berkonflik menempatkan masing-masing komunikator politiknya dalam struktural kepanitiaan munas tersebut guna nantinya mampu mengakomodir kepentingan politik dari masing-masing kedua belah pihak.

Namun, pada dasarnya keunikan dari penelitian ini adalah adanya upaya dari Aburizal Bakrie untuk mempertahankan statusnya atau *status quo,* yang bersangkutan dengan masalah penggelapan pajak yang belum tuntas dan juga kasus Lapindo yang sampai hari ini belum terselesaikan dimana Aburizal Bakrie berupaya mengamankan status pribadinya atau demi kepentingan pribadinya jika masih memimpin ketua umum Partai Golkar, sedangkan dari kubu Agung Laksono sendiri ingin membawa Partai Golkar masuk dalam koalisi rezim yang berkuasa hari ini atau koalisi Indonesia Hebat yang mana dari rezim yang berkuasa pun ada upaya tarik ulur terhadap Partai Golkar agar merapat kepemerintahan, namun sebaliknya pihak Aburizal sendiri menginginkan Partai Golkar tetap dalam koalisi oposisi yaitu Koalisi Merah Putih, oleh karenanya pertentangan internal Partai Golkar menguat dengan adanya perihal tersebut.

Besar harapan dari berbagai pihak terutama masyarakat politik Partai Golkar agar musyawarah luas biasa ini menjadi jalan akhir dari konflik berkepanjangan ini. Musyawarah luar biasa ini diharapkan menjadi forum konsolidasi partai golkar agar partai tersebut mampu mempersiapkan diri guna

menyonsong agenda besar politik di negri ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Golkar menjadi partai yang sangat *historis*, yang banyak menghasilkan kader dan politisi handal di negeri ini. Bisa diartikan lebih jauh kalau Partai Golkar ini menjadi objek empiris bagi banyak politisi-politisi di Negeri ini. Partai Golkar harus mampu kembali ke jalurnya untuk meraih puncak kejayaannya seperti yang pernah di torehkan pada pemilu 2004 dalam masa reformasi ini. Partai Golkar harus mampu meneror rival politiknya bahwa partai berlambang beringin ini adalah partai yang kuat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitinya adalah sebagai berikut ini :

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Dinamika Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Munas Luar Biasa Partai Golkar 2016?

Untuk lebih fokusnya maka permasalahan dijelaskan di rumusan masalah mikro dibawah ini:

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana Proses Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan PusatPartai Golkar Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016?
2. Bagaimana Realitas Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016?
3. Apa Yang Dilakukan Partai Golkar Dalam Komunikasi Politik Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitiaan

Maksud dan Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka maksud dari penelitian ini adalah Untuk Mengehtahui Dinamika Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Munas Luar Biasa Partai Golkar 2016.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengehtahui Proses Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016.
2. Untuk Mengehtahui Realitas Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016.
3. Untuk Mengehtahui Apa Yang Dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dalam Komunikasi Politik Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan bagi banyak pihak, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah, mengembangkan disiplin ilmu dalam terkhusus dalam kajian

komunikasi politik dan juga nantinya dapat merangsang lahirnya penelitian lanjut dalam pembedahan kasus maupun objek yang berbeda.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Untuk Peneliti

Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah meningkatkan pengehtahuan dan pengelaman peneliti dalam mempelajari disiplin ilmu komunikasi terkhusus dalam komunikasi politik.

B. Untuk Akademik

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademik diharapkan:

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan dan menambah khazanah ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan kajian komunikasi politik.
2. Memperkaya hasil-hasil penelitian komunikasi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi studi kasus yang menggunakan perspektif komunikasi politik.
3. Sebagai bahan masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama atau yang ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan di bidang ilmu komunikasi atau komunikasi politik khususnya.

C. Untuk Intansi Terkait

Adapun kegunaan penelitian ini bagi instansi adalah untuk melengkapi data-data untuk instansi yang sudah menjadi objek, serta menjadi bahan informasi, masukan dan evaluasi terhadap instansi tersebut**.**